

**IMPLEMENTASI DAN DINAMIKA DEMOKRATISASI WARGA DALAM  
PEMBENTUKAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DI  
LINGKUNGAN CILOANG RT. 05/09 KELURAHAN SUMUR PECUNG  
KECAMATAN SERANG KOTA SERANG**

**IMPLEMENTATION AND DYNAMICS OF CITIZEN DEMOCRATIZATION IN  
THE ELECTION OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATION (RT) LEADERS IN  
CILOANG RT 05/09, SUMUR PECUNG VILLAGE, SERANG CITY**

**<sup>1</sup> Febryan Ajeng Ramdani, <sup>2</sup> Jaka Maulana,**

*<sup>1,2</sup>Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang  
Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183*

*email : <sup>1</sup>dosen02894@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen02887@unpam.ac.id*

**ABSTRAK**

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05/09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, dan mengidentifikasi tantangan yang mempengaruhi partisipasi warga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa meskipun pemilihan telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi warga masih rendah, terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran warga akan pentingnya pemilihan tersebut. Warga yang lebih muda dan berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif, sementara warga dengan tingkat sosial-ekonomi yang lebih rendah kurang berpartisipasi. Analisis juga mengungkapkan bahwa calon Ketua RT yang proaktif dalam berinteraksi dengan masyarakat mendapatkan dukungan lebih besar. Rendahnya partisipasi berdampak negatif pada legitimasi pemimpin yang terpilih, yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Pengabdian ini menyoroti perlunya peningkatan strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi yang lebih merata. Dengan partisipasi yang lebih tinggi, pemilihan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan memiliki legitimasi yang kuat, serta mendukung pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan di tingkat lokal.

**Kata Kunci :** Pemilihan Ketua RT, partisipasi warga, demokrasi lokal, sosialisasi, legitimasi.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the process of electing the Head of the Neighborhood Association (RT) in the Ciloang RT 05/09 area, Sumur Pecung Village, Serang District, and to identify challenges that affect citizen participation. The research employed a qualitative approach using participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that while the election was conducted according to democratic principles, citizen participation remained low, primarily due to insufficient socialization and a lack of awareness of the election's importance. Younger and more educated residents tended to be more active, whereas those with lower socio-economic status were less involved. The analysis also revealed that RT candidates who were proactive in engaging with the community received greater support. Low participation negatively impacted the legitimacy of the elected leader, which could affect leadership effectiveness. This study highlights the need to enhance socialization strategies and more inclusive political education to encourage broader participation. With increased participation, the election is expected to produce more representative leaders with strong legitimacy, thereby supporting more sustainable social development at the local level.*

**Keywords :** citizen participation, local democracy, socialization, legitimacy.

## I. PENDAHULUAN

Istilah Rukun Tetangga (RT) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang, di mana RT dikenal dengan istilah *Tonarigumi*. Sistem ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengorganisir penduduk dalam rangka persiapan perang melawan sekutu, dengan ketua RT atau *Gumichoo* berperan sebagai pengawas (Nugraha, 2018). Setelah kemerdekaan, sistem ini beradaptasi dengan nilai-nilai lokal dan menjadi bagian dari tatanan sosial Indonesia, terutama dalam konteks musyawarah untuk mufakat. Musyawarah ini selaras dengan prinsip Demokrasi Pancasila, yang menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan saling menghormati (Wibowo, 2019). Demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang paling tepat untuk mengelola keberagaman di Indonesia (Fauzi, 2020).

Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi di bawah Rukun Warga (RW). Meskipun tidak termasuk dalam struktur pemerintahan formal, RT dan RW berfungsi sebagai unit terkecil dalam organisasi sosial yang dipilih melalui musyawarah masyarakat setempat. Pembentukan RT dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, dan pemilihan Ketua RT dilakukan secara langsung oleh warga (Sari, 2021). Fungsi utama RT dan RW adalah untuk mengelola berbagai kegiatan sosial dan administratif di lingkungan mereka. Keberadaan RT dan RW mencerminkan bagaimana demokrasi diterapkan pada tingkat komunitas, dengan pemimpin yang dipilih berdasarkan konsensus warga (Putri, 2018).

Menurut Perwal Kota Serang nomor 18 Tahun 2023, RT dan RW berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung terhadap berbagai kegiatan warga. Lembaga ini juga menjadi mitra Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan berbagai program pemerintah dan kegiatan sosial masyarakat (Perwal Kota Serang No. 18, 2023). Pemilihan Ketua RT diatur dengan ketat, di mana pemungutan suara harus melibatkan setidaknya dua pertiga dari kepala keluarga yang ada. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara demokratis dan representatif, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak mayoritas warga. RT dan RW dengan demikian menjadi elemen penting dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas di masyarakat (Yulianto, 2020).

Pemilihan Ketua RT dan RW harus dilakukan dengan prinsip demokrasi yang kuat dan perencanaan yang matang. Proses pemilihan ini tidak hanya soal memilih

pemimpin, tetapi juga tentang menjaga asas kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Kusuma, 2022). Dengan demikian, diharapkan bahwa pemimpin yang terpilih adalah orang yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan dipercaya oleh warga. Hal ini penting karena RT dan RW merupakan garda terdepan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal (Sutrisno, 2017).

## II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di Lingkungan Ciloang RT 05/09 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali dan memahami dinamika sosial serta interaksi antarwarga dalam konteks pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) (Mardiyanto, 2016). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam proses demokratisasi dan partisipasi warga dalam pemilihan ketua RT. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen resmi terkait kebijakan dan regulasi yang berlaku (Astuti, 2019).

Observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai situasi di lapangan, termasuk bagaimana proses pemilihan ketua RT dilaksanakan. Peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilihan, seperti rapat warga dan musyawarah, untuk mengamati interaksi antarwarga dan dinamika yang terjadi selama proses pemilihan (Wulandari, 2021). Observasi ini dilakukan selama beberapa minggu untuk menangkap berbagai aspek yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain. Hasil observasi dicatat secara rinci dalam jurnal lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, termasuk calon ketua RT, warga, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti pengurus Rukun Warga (RW) dan tokoh masyarakat (Rahmawati, 2022). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya tentang motivasi, tantangan, dan harapan mereka terkait pemilihan ketua RT. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan konteks dan responden. Data dari wawancara ini kemudian

dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan isu-isu kunci (Prasetyo, 2023).

Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang RT dan RW, termasuk Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 (Perwal Kota Serang No. 18, 2023). Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari pembentukan dan operasionalisasi RT dan RW. Analisis dokumen ini juga digunakan untuk mengkaji sejauh mana regulasi ini diterapkan dalam praktik di lapangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pemilihan ketua RT.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian ini mengungkapkan bahwa proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05/09, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam hal partisipasi warga. Observasi partisipatif yang dilakukan mengindikasikan bahwa banyak warga masih menganggap pemilihan Ketua RT sebagai formalitas belaka, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Rendahnya partisipasi warga ini menjadi salah satu indikator utama kurangnya kesadaran akan pentingnya posisi Ketua RT dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial di lingkungan mereka. Selain itu, sosialisasi yang kurang efektif dari pihak penyelenggara turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi, karena informasi mengenai pemilihan sering kali tidak sampai secara merata kepada seluruh warga. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses pemilihan ini, yang pada akhirnya akan mempengaruhi legitimasi dan efektivitas kepemimpinan RT yang terpilih, terlihat pada gambar 1.



**Gambar 1. Wawancara mendalam dengan Warga dan Calon Ketua RT**

Wawancara mendalam dengan warga dan calon Ketua RT menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya peran Ketua RT, banyak warga merasa bahwa informasi mengenai proses dan calon yang bersaing tidak disampaikan secara memadai. Warga sering kali merasa tidak terlibat dalam proses pemilihan karena mereka tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada penilaian yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam strategi komunikasi yang digunakan oleh penyelenggara dan calon, di mana informasi tidak tersampaikan secara efektif kepada warga. Beberapa warga mengungkapkan bahwa mereka hanya mengetahui tentang pemilihan ketika sudah mendekati hari pemilihan, dan bahkan beberapa tidak mengetahui nama-nama calon yang bersaing. Ini menandakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik, yang tidak hanya menyampaikan informasi secara tepat waktu tetapi juga mendorong warga untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan.

Analisis dokumen terkait, seperti Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan panduan yang cukup jelas mengenai tata cara pemilihan Ketua RT, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Regulasi ini mengatur proses pemilihan secara rinci, termasuk persyaratan jumlah suara dan tata cara pemilihan yang demokratis. Namun, implementasi di tingkat lokal sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan warga menyebabkan regulasi yang ada tidak sepenuhnya dipahami atau diterapkan dengan

benar. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dari regulasi dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan legitimasi hasil pemilihan.

Pengabdian ini juga menemukan adanya perbedaan signifikan dalam partisipasi warga berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Warga yang lebih muda dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif terlibat dalam proses pemilihan dibandingkan dengan warga yang lebih tua atau berpendidikan rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan generasi muda dan mereka yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi. Generasi muda cenderung lebih terpapar pada berbagai platform media sosial yang menyediakan informasi tentang pemilihan, sementara warga yang lebih tua dan kurang berpendidikan mungkin merasa terisolasi dari arus informasi ini. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penyebaran informasi dan pelibatan warga, sehingga semua kelompok dapat berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi.

Selain itu, Pengabdian ini mengungkapkan bahwa partisipasi warga dalam pemilihan Ketua RT juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-ekonomi. Warga yang berada pada tingkat sosial-ekonomi yang lebih rendah cenderung kurang berpartisipasi dalam pemilihan, yang dapat dikaitkan dengan kurangnya waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan komunitas. Mereka mungkin lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari yang mendesak, seperti mencari nafkah, sehingga kurang memiliki waktu atau energi untuk terlibat dalam proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh kesadaran politik tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi warga. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi warga harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan mencari cara untuk membuat proses pemilihan lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Partisipasi rendah dalam pemilihan Ketua RT memiliki dampak langsung pada legitimasi pemimpin yang terpilih. Ketua RT yang dipilih dengan partisipasi rendah mungkin akan menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari warga. Legitimasi yang rendah dapat menghambat kemampuan Ketua RT untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif, karena mereka mungkin tidak dipandang sebagai representasi yang sah dari kehendak warga. Ini juga dapat mempengaruhi hubungan antara Ketua RT dan warga, di mana warga mungkin kurang merasa terikat atau

mendukung pemimpin yang mereka anggap tidak memiliki dukungan yang luas. Dengan demikian, partisipasi yang tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan dapat bekerja dengan dukungan penuh dari komunitas.

Pembahasan lebih lanjut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan Ketua RT, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif dan strategi komunikasi yang tepat sasaran. Penggunaan media lokal, selebaran, dan pertemuan langsung dengan warga dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang pemilihan dan mendorong partisipasi warga. Namun, sosialisasi ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilihan tetapi juga sebagai bagian dari upaya pendidikan politik jangka panjang. Pendidikan politik yang berkelanjutan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, serta untuk membangun budaya partisipasi yang lebih kuat di tingkat komunitas.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga dalam pemilihan sangat dipengaruhi oleh bagaimana calon Ketua RT berinteraksi dengan masyarakat. Calon yang lebih proaktif dalam berkomunikasi dan mendekati warga cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa selain sosialisasi dari pihak penyelenggara, inisiatif dari calon itu sendiri juga sangat penting. Calon Ketua RT yang aktif mendekati warga, memahami kebutuhan mereka, dan merespons aspirasi warga lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan luas. Hal ini juga menunjukkan pentingnya karakter dan pendekatan personal calon dalam menarik partisipasi warga. Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan peluang calon untuk terpilih, tetapi juga akan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemimpin dan komunitas.

Pada akhirnya, menyoroti bahwa keberhasilan pemilihan Ketua RT tidak hanya bergantung pada prosedur formal yang diatur oleh regulasi, tetapi juga pada dinamika sosial di lingkungan tersebut. Partisipasi warga yang tinggi dalam pemilihan mencerminkan adanya kepercayaan dan harapan terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pengurus RT, calon Ketua RT, dan warga, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih partisipatif dan inklusif. Sinergi ini akan membantu memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih dan memastikan bahwa kepentingan warga benar-benar terwakili. Ini juga akan membantu membangun budaya demokrasi yang lebih kuat di tingkat lokal,

yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan, terlihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Tim PKM Dosen foto Bersama dengan warga**

Secara keseluruhan, memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan Ketua RT. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dengan partisipasi warga yang lebih aktif, proses pemilihan tidak hanya akan lebih representatif, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara warga dan pemimpin mereka. Peningkatan partisipasi warga tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih, tetapi juga akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih demokratis dan berdaya saing di masa depan. Dengan partisipasi yang lebih merata dan inklusif, proses demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan komunitas yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Menunjukkan bahwa proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Lingkungan Ciloang RT 05/09, meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal partisipasi warga. Rendahnya partisipasi ini terutama disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan rendahnya kesadaran warga tentang pentingnya pemilihan tersebut. Temuan juga menunjukkan adanya perbedaan partisipasi berdasarkan usia dan tingkat pendidikan, dengan warga yang lebih muda dan berpendidikan tinggi

cenderung lebih aktif terlibat. Selain itu, meskipun regulasi yang ada telah memberikan panduan yang jelas, implementasinya di lapangan masih kurang optimal, yang memerlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar upaya peningkatan sosialisasi dan pendidikan politik lebih diperkuat, baik oleh pihak penyelenggara maupun calon Ketua RT, untuk memastikan warga mendapatkan informasi yang cukup dan merasa terdorong untuk berpartisipasi. Strategi komunikasi yang lebih inklusif, yang mampu menjangkau semua kelompok warga, sangat diperlukan. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengurus RT dan RW juga penting untuk memastikan regulasi dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di lapangan. Dengan upaya tersebut, diharapkan partisipasi warga dalam pemilihan Ketua RT dapat meningkat, sehingga menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan memiliki legitimasi yang kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, A. (2019). *Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus Pemilihan Ketua RT di Kota Serang*. Jurnal Ilmu Sosial, 12(1), 45-58.
- Fauzi, F. (2020). *Implementasi Demokrasi Pancasila di Era Modern*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Kusuma, D. (2022). *Partisipasi Politik dalam Pemilihan Ketua RT: Kajian Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Media Nusantara.
- Mardiyanto, B. (2016). *Studi Kasus dalam Pengabdian Kualitatif: Pendekatan dan Metode*. Bandung: Penerbit Maju.
- Nugraha, R. (2018). *Tonarigumi di Indonesia: Sejarah dan Pengaruhnya*. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Perwal Kota Serang No. 18 Tahun 2023 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Prasetyo, H. (2023). *Analisis Sosial dan Politik: Studi Kasus Pemilihan di Tingkat RT/RW*. Surabaya: Penerbit Cipta.
- Putri, S. (2018). *Demokrasi dan Pluralisme di Indonesia: Pendekatan Multikulturalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmawati, I. (2022). *Sosialisasi Politik di Tingkat Lokal: Studi Pemilihan Ketua RT*. Jurnal Politik Lokal, 15(2), 112-130.
- Sari, M. (2021). *Pentingnya Sosialisasi dalam Pemilihan Ketua RT di Era Digital*. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Sutrisno, T. (2017). *Gotong Royong dan Demokrasi Pancasila*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Wibowo, A. (2019). *Sejarah Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rakyat.
- Wulandari, E. (2021). *Pendidikan Politik untuk Masyarakat: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: Penerbit Ilmu.